

PENGAWASAN VERIFIKASI SURDUK INDEPENDEN

Dicatat, Penyelenggara Pengawas Desa Hingga PPS

WONOSARI (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul menemukan banyak hal dalam pengawasan verifikasi surat dukungan bakal calon bupati dan bakal calon bupati (bacabup) independen. Bahkan nama penyelenggara Pilkada yakni pengawas desa hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dicatat namanya masuk dalam surat dukungan. Termasuk adanya nama PNS yang juga dicatat dalam daftar dukungan. "Memang banyak temuan mulai dari nama penyelenggara hingga PNS yang dicatat masuk dalam dukungan," kata Komisioner Bawaslu Gunungkidul, Rosita SPdI, Kamis (2/7).



Rosita SPdI

di catat dalam surat dukungan. Hal lainnya yakni terkait temuan daftar ganda, artinya ada yang sama-sama surat dukungan tersebut mendukung dua bakal calon independen. "Tim pengawas desa ikut melakukan pengawasan dalam verifikasi surat dukungan ini. Memang banyak temuan di lapangan," ujarnya.

Diungkapkan, temuan lain juga banyak warga yang tidak tahu menahu, namun masuk dalam dukungan. Laporan dari panwas desa, masyarakat yang usianya sudah lanjut ini namanya

Terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengungkapkan, terkait dengan temuan di lapangan, sesuai aturan untuk TNI, Polri, PNI, akan masuk Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Termasuk penyelenggara pemilihan, lurah desa dan perangkat desa aktif, nantinya masuk TMS. "Memang sesuai aturan apabila ada yang dicatat mulai dari TNI, Polri, PNI, penyelenggara, lurah desa aktif masuk dalam TMS," jelasnya.

(Ded/Bmp)-a

BODRONOYO DESAK DPRD SEGERA SAHKAN RAPERDA LURAH

Molor, Pengaruhi Penganggaran Kalurahan

WATES (KR) - Pengurus dan anggota Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh Kulonprogo (Bodronoyo) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lurah. Mereka khawatir molornya pengesahan regulasi tersebut akan mempengaruhi penganggaran pemilihan lurah pada 2021 mendatang.

"Kami berharap raperda segera disahkan jadi perda, kemudian eksekutif menerbitkan peraturan bupati (perbup). Kalau pengesahannya akhir tahun tentu akan menyulitkan pemerintah kalurahan dalam mengatur ritme pembuatan regulasi untuk

tahun 2021," kata Ketua Umum Bodronoyo Dwi Andana, Kamis (2/7).

Sementara itu Ketua Bodronoyo Anton Supriyono mengatakan, pada 17 Juni lalu, Dewan telah mengundang Pengurus Bodronoyo publik hearing Raperda Lurah dihadiri

Ketua DPRD Akhid Nuryati, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Lurah Suprpto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Daldud dan KB) Sudarmanto SIP.

"Dalam publik hearing, kami menyoroti tentang lamanya Penjabat (Pj) lurah menjabat sampai direncanakannya pemilihan lurah serentak di 35 kalurahan di Kulonprogo, Oktober 2021. Selain itu perihal Pj lurah yang sampai sekarang belum memberi hak-hak atau pengaremarem sesuai peraturan bagi lurah yang sudah pur-

na," ungkapnya. Ketua Pansus Raperda Lurah DPRD Kulonprogo, Suprpto mengakui penetapan raperda memang mundur dari jadwal karena kesibukan. Seharusnya awal Juli paripurna tapi mundur beberapa hari. "Besok 7 Juli checking draft dan 10 Juli paripurna," ujarnya.

Menurut Kepala Dinas PMD Daldud & KB, Sudarmanto MSi, desakan Bodronoyo agar raperda segera disahkan jadi perda sudah diakomodir, usulan-usulan yang mereka sampaikan sudah dimasukkan dalam rencana perubahan raperda.

(Rul/Wid)-a

PENUTUPAN PPDB SMA/SMK Sekolah Pinggiran Kekurangan Siswa

WATES (KR) - SMA dan SMK di wilayah pinggiran Kulonprogo menjadi satu-satunya harapan bagi para lulusan SMP/MTs yang tidak lolos seleksi online pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021.

Koordinator Pengawas SMA/SMK Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kulonprogo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Sudarmadi yang dihubungi Kamis (2/7) mengakui terdapat sejumlah sekolah di pinggiran kekurangan calon peserta didik baru. "Harapan satu-satunya menerima calon peserta didik baru dari luar daerah dan lulusan SMP/MTs rawan putus sekolah yang tidak melanjutkan ke SMA atau SMK," ujar Sudarmadi yang memantau PPDB di Balai Dikmen Kulonprogo.

Menurutnya, kekurangan calon peserta didik baru disebabkan tidak seimbang antara lulusan SMP/MTs dan daya tampung SMA/SMK. Lulusan SMP/MTs 2019/2020 di Kulonprogo hanya sekitar 5.000 orang dan daya tampung SMA/SMK sekitar 8.000 orang.

Pengawas SMA/SMK Balai Dikmen Kulonprogo, Jawahir menjelaskan dari sekitar 5.000 orang lulusan SMP/MTs, belum tentu semua melanjutkan ke SMA/SMK di Kulonprogo. Sebagian besar dari luar daerah berdekatan dengan perbatasan kabupaten yang melanjutkan sekolah di Kulonprogo.

(Ras)-a

OPERASI YUSTISI PERDA Dapati Karaoke Aktif dan Mihol

TEMON (KR) - Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rabu (1/7) malam, berhasil mendapati karaoke di wilayah Kapanewon Temon yang masih aktif dan minuman beralkohol (mihol).

Penegakan dua Perda masing-masing, Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya jo. Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Serta Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tenda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

"Karaoke milik AS yang diduga ilegal dan meresahkan masyarakat, saat tim operasi ke lokasi memang mendapati karaoke sedang aktif. Kami ini dalam rangka pula menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas usaha karaoke tersebut," ujar Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kulonprogo Drs Sumiran, Kamis (2/7).

Tim sampai di tempat kejadian perkara (TKP) milik AS sedang berlangsung aktivitas karaoke dan didapati 1 botol minuman beralkohol.

(Wid)-a

Pengelola Goa Pindul Berbenah



KR-Endar Widodo

Pengelola Goa Pindul menata alur protokol kesehatan.

WONOSARI (KR) - Seluruh operator Objek Wisata (Obwis) Goa Pindul di Desa Bejiharjo masih melakukan persiapan uji coba akan dilakukan, Senin (6/7). Selain membersihkan tempat dan lingkungan juga menata alur untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebelum masuk mendaftar di operator wisatawan wajib melakukan pengecekan suhu badan dengan termogun.

Dilanjutkan cuci tangan dengan sabun dan disemprot disinfektan. "Sekarang semua operator melakukan penataan prosedur protokol kesehatan," kata Wakil Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Agung Susinantoro SPd, Kamis (2/7).

Dalam kunjungan ke Goa Pindul Drs

Abdul Halim Iskandar MPd selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDIT) memang mengimbau segera membuka Obwis Goa Pindul, tetapi sebagai pengelola mengikuti prosedur yang diputuskan Gugus Tugas Kabupaten. Minggu ini operator persiapan tempat dan protokol kesehatan, selanjutnya akan dievaluasi oleh Gugus Tugas.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Hery Sukmono ST, pembukaan destinasi wisata belum dapat dilakukan saat ini. Sekarang sedang dilakukan uji coba terbatas sesuai dengan surat edaran Kadispar Pariwisata Gunungkidul atau surat edaran Kadispar DIY. "Jadi pembukaannya masih menunggu evaluasi Gugus Tugas Covid-19," tambahnya.

(Ewi)-a

PENYEBARAN COVID-19

Tambah 2 Positif, Klaster Perjalanan dari Jatim

WONOSARI (KR) - Pergerakan Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul masih terus terjadi dan setelah dua hari tidak ada penambahan pasien positif, kini bertambah lagi 2 orang yakni perempuan berusia 36 tahun dan seorang laki-laki berusia 59 tahun masing-masing beralamat di Kapanewon Wonosari, Kamis (2/7). Temuan pasien baru ini diketahui dari hasil tracing dan rapid test maupun pemeriksaan swab atas riwayat kontak dengan pasien sebelumnya berasal dari klaster perjalanan dari Jawa Timur. iKedua pasien positif ini masih satu keluarga dengan pasien positif terakhir ke 52 sebelumnya beralamat di Wonosari, i kata Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul dr Dewi Irawaty MKes, Kamis (2/7).

Merujuk dari informasi hasil tracing penularan ini bermula dari seorang pasien yang memiliki riwayat perjalanan

dari Jawa Timur. Yang bersangkutan melakukan pulang kampung dalam kondisi telah dinyatakan positif. Dengan menumpang angkutan umum yang bersangkutan akhirnya dilakukan penjemputan di Siyono, Playen dan akhirnya dirawat di RSUD Wonosari.

Data pergerakan Covid-19 hingga Kamis (2/7) total pasien positif kumulatif sebanyak 54 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) hasil rapid tes reaktif 519 orang, Selesai pemantauan 1.260 orang, dalam pemantauan 72 orang, dirawat 4 orang Pasien dan meninggal 12 orang. Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 169 orang, meninggal dunia 24 orang. Pasien positif Covid-19 meninggal 1 orang dan lainnya dinyatakan sembuh. "Untuk warga reaktif hasil rapid test sebagian menjalani karantina di Wisma Wanagama, Playen," jelasnya.

(Bmp)-a

PEMETAAN RISIKO KASUS COVID-19

Kulonprogo Menuju Adaptasi Normal Baru

WATES (KR) - Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo menjelaskan, kondisi dan situasi Covid-19 di DIY belum dapat diselesaikan maka perpanjangan dilakukan. "Untuk memberi waktu bagi gugus tugas dalam membuat payung hukum terkait pelaksanaan tugas mereka.

Secara geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikelilingi zona yang tidak hijau," ujarnya saat pemetaan risiko kasus Covid-19 menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten Kulonprogo di Aula Adikarta Gedung Kaca Kompleks pemkab setempat, Selasa (30/6) lalu.

Hadir dalam kegiatan menghadapi fase *new normal* tersebut Wabup Fajar Gegana selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kulonprogo, Ketua DPRD Akhid Nuryati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulonprogo, Sekretaris Daerah RM Astungkoro para Kepala OPD, tokoh masyarakat, dinas kesehatan, Kejaksaan Negeri Kulonprogo, Dandim 0731/Kulonprogo, Kapolres setempat AKBP Tartono MBA.

Beberapa hal yang dibahas di antaranya tentang SOP *new normal* dilanjutkan penandatanganan Maklumat Bersama tentang Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 1441 Hijriah serta penyerahan 2.500 masker kepada masyarakat.

Bupati mengatakan, diperpanjangnya status tanggap darurat hendaknya diimbangi dengan upaya memberi ruang publik agar dapat melakukan pendataan elektronik yang banyak dikunjungi orang. Pedoman tatanan kehidupan baru atau kenormalan baru Covid-19 di Kulonprogo, baik dari sisi sosial, ekonomi, aparatur lain agar terhindari dari paparan virus Korona.

Sedangkan Plt Kepala Dinkes Kulonprogo dr Sri Budi Utami mengatakan, kendati Kulonprogo saat ini masih dalam kondisi aman virus Korona tapi ancaman masih sangat tinggi. Karena itu diperlukan pemahaman yang benar di masyarakat dan kebijakan untuk melindungi diri. "Mengangkat *tagline* Orang Pinter, Pakai Masker, hal ini untuk menggerakkan masyarakat agar terbiasa memakai masker ketika berada di luar rumah," tuturnya.

(Rul)-a



MEMPERINGATI 98 TAHUN PERGURUAN TAMANSISWA

SEJARAH berdirinya Perguruan Tamansiswa berawal dari keikutsertaan RM Soewardi Soerjaningrat yang kita kenal dengan Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1921 bergabung dalam perkumpulan Selasa Kliwonan yang dipimpin oleh KiAgeng Suryomartana, dengan tujuan Mamyu hayuning Sarira, Bangsa dan Manungsa/Bawana (Mencita-citakan kebahagiaan bagi diri pribadi, bangsa dan umat manusia sedunia). Pada perkumpulan tersebut, mulai timbul gagasan untuk memecahkan persoalan tentang cara mencapai kemerdekaan melalui perjuangan dalam bidang pendidikan yaitu pendidikan jiwa merdeka. Pada tanggal 3 Juli 1922 bertempat di Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara dengan dibantu oleh Nyi Hadjar, Soetomo Soeryokoesoemo, Soeryo Poetro, Soebono, Pronowidigdo, Soetopo Wonoboyo, Tjokrodirjo dan tokoh lainnya mendirikan Perguruan Tamansiswa sebagai upaya perjuangan meraih kemerdekaan melalui kebudayaan dan pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai masyarakat yang tertib damai, salam dan bahagia. Tamansiswa mengusung konsep pendidikan yang berdasar pada garis hidup bangsa yang ditujukan untuk keperluan kehidupan dan mengangkat derajat hidup bangsa Indonesia. Pendidikan bagi Tamansiswa merupakan media/sarana untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia yang merdeka lahir dan batinnya. Tamansiswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang beralas kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaannya pendidikan Tamansiswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan.

Dalam perjalanannya Tamansiswa mengalami pasang surut. Pada zaman sebelum kemerdekaan, Tamansiswa berkembang dengan pesat karena sifatnya yang berpihak pada rakyat kecil. Namun perkembangan yang pesat menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu khawatir tentang keberadaan Tamansiswa sebagai tempat pempukan kader-kader bangsa dimasa mendatang, yang menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Hal ini disinyalir akan mengancam dan dapat menumbangkan kekuasaan kolonial, sehingga pada tahun 1932 dikeluarkan UU Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie). Pemerintah Kolonial mengeluarkan ordonansi melarang sekolah liar dan sekolah Tamansiswa termasuk yang dianggap



liar. Adanya aturan tersebut menimbulkan perlakuan dari Tamansiswa dan kaum pergerakan nasional karena dianggap sangat merugikan rakyat. Perlawanan tersebut akhirnya dapat membuahkan hasil dan Tamansiswa dapat melewati masa-masa sulit dan terus berjuang melanjutkan tujuannya. Pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini, Tamansiswa terus berjuang dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang terjadi. Hambatan dari internal diantaranya adalah krisis kepemimpinan karena terjadi kesenjangan generasi di lingkungan Tamansiswa. Hambatan dan tantangan Tamansiswa lainnya yaitu kondisi sekolah pada cabang cabang Tamansiswa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada saat ini banyak yang kondisinya kritis dan memprihatinkan bahkan ada yang terpaksa tutup. Keberadaan sekolah Tamansiswa di berbagai daerah merupakan sekolah perintis Pendidikan di Indonesia yang seharusnya didukung penuh oleh pemerintah.

Tamansiswa akan terus berjuang hingga masa yang akan datang. Pendidikan Tamansiswa akan memberi warna bagi sistem Pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berjiwa merdeka adalah konsep pendidikan Tamansiswa. Pendidikan harus memerdekakan anak didik (merdeka batinnya, merdeka tenaganya dan merdeka pikirannya) dengan menerapkan sistem among yaitu sebuah sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan pada kodrat alam dan kemerdekaan, menurut cara belakunya sistem ini disebut Tut Wuri Handayani. Pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan tiga pusat pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat), kerjasama antar pusat

Pendidikan ini penting dilaksanakan karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan harus memupuk rasa kebangsaan, yang merupakan unsur fundamental dalam mempersatukan bangsa. Pendidikan harus dilaksanakan dengan mengangkat dan mengumandangkan kemampuan dan keunggulan khas budaya Nasional Indonesia, kekayaan dan potensi serta keunikan sumber daya alam Indonesia yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran.

Ajaran Tamansiswa akan diaktualisasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas agar membumi dengan memegang prinsip SBII. Sifat Tamansiswa sebagai badan perjuangan kebudayaan, yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme dan cinta pada ibu pertiwi tidak akan berubah dan akan terus ditanamkan dan diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang. Sedangkan bentuk, isi dan irama dapat berubah secara dinamis mengikuti kemajuan zaman. Memasuki usia 98 tahun, Tamansiswa masih harus berbenah terutama dalam mengatasi hambatan dan tantangan internal dan eksternal agar tetap eksis dan dapat terus berkontribusi terhadap Pendidikan di Indonesia. Tamansiswa bersifat kooperatif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yang memerdekakan. Tamansiswa bersifat konsultatif, siap memberikan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk kemajuan bangsa. Tamansiswa juga bersifat korektif, diminta atau tidak tetap mengoreksi program dan kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pada momentum ini, Tamansiswa juga berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan dukungan kepada Perguruan Tamansiswa yang merupakan perintis pendidikan Indonesia. Dukungan pemerintah sangat diperlukan terutama untuk membantu eksistensi keberadaan sekolah di cabang-cabang Tamansiswa yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia agar tetap dapat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa dan membantu pemerintah dalam pemerataan Pendidikan.

Yogyakarta, 3 Juli 2020

Prof Pardimin MPd PhD

Waketum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa dan Rektor UST